

## Transformasi Politik Pasca Khalifahan: Studi Atas Peran Muawiyah Ibn Abi Sofyan Dalam Pembentukan Dinasti

Fitri Rahayu<sup>1</sup>, Afrizal<sup>2</sup>, Syawaluddin<sup>3</sup>

Email: [fithrirahayu471@gmail.com](mailto:fithrirahayu471@gmail.com), [afrizal.m@uin-suska.ac.id](mailto:afrizal.m@uin-suska.ac.id),  
[regarsawaluddin@gmail.com](mailto:regarsawaluddin@gmail.com)

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

### ABSTRACT

#### Article history:

Received 30 Mei 2025

Revised 6 Juni 2025

Accepted 30 Juni 2025

#### Keyword:

Political Transformation,  
Muawiyah, Dynastic  
Formation

*This research aims to analyze the role of Muawiyah Ibn Abi Sufyan in the formation of the Umayyad Dynasty as an important transition in Islamic politics after the Caliphate. This study utilizes a descriptive qualitative approach with library research methods that examine primary and secondary literature related to Muawiyah's reign. The main focus of this research is on the change in the governance system from the consultation-based Caliphate (syura) model to a hereditary dynasty system. Muawiyah, as the governor of Syria and a pragmatic political figure, employed clever political strategies to consolidate power and establish the first dynasty in the history of Islamic politics. This research also discusses the impact of this political change on power structures and legitimacy within the Islamic society, as well as examines the reactions of opposition groups such as the Shiites who reject the dynastic system. The findings of this research indicate that while the establishment of dynasties brings political stability, this system triggers a shift in the initial values of Islamic governance, which subsequently affects the development of Islamic political history. Thus, this study provides new insights into the fundamental changes in Islamic politics that occurred under the leadership of Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Political Transformation, Muawiyah, Dynastic Formation.*

Copyright © 2018, AL-USWAH.  
All rights reserved

Corresponding Author:

**Fitri Rahayu**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [fithrirahayu471@gmail.com](mailto:fithrirahayu471@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Sejarah awal Islam tidak hanya menyimpan catatan tentang perkembangan agama, tetapi juga tentang dinamika kekuasaan yang kompleks dan penuh pergolakan. Salah satu titik balik paling penting dalam sejarah politik Islam terjadi pasca wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Peristiwa tersebut membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan umat Islam, dari bentuk kepemimpinan kolektif berbasis syura menjadi bentuk pemerintahan dinasti atau monarki turun-temurun.<sup>1</sup> Tokoh kunci dalam peralihan sistem tersebut adalah Muawiyah Ibn Abi Sufyan, yang mendirikan Dinasti Umayyah dan menjadi khalifah pertama dalam struktur pemerintahan dinasti Islam.<sup>2</sup>

Muawiyah, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Syam sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dikenal sebagai tokoh yang cakap dalam bidang administrasi dan diplomasi. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib dan pengunduran diri Hasan bin Ali dari kursi kekhalifahan, Muawiyah berhasil mempersatukan

umat Islam di bawah kepemimpinannya pada tahun 661 M. Namun, kepemimpinannya sekaligus membawa perubahan fundamental dalam struktur kekuasaan Islam. Ia tidak hanya menjadi pemimpin politik umat Islam, tetapi juga menciptakan preseden baru dengan menunjuk putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai penerus, yang menjadi tonggak awal sistem dinasti dalam sejarah Islam.<sup>3</sup>

Perubahan sistem pemerintahan ini tidak hanya berdampak pada ranah politik, tetapi juga berimplikasi luas dalam bidang sosial dan teologis. Banyak kalangan ulama dan sejarawan menilai langkah Muawiyah sebagai bentuk pragmatisme politik yang bertujuan menjaga stabilitas umat pasca konflik berkepanjangan antara kubu Ali dan Muawiyah, yang dikenal sebagai Fitnah Kubra (konflik besar).<sup>4</sup> Namun, di sisi lain, keputusan ini juga memicu kritik terhadap penyimpangan dari nilai-nilai syura dan kesetaraan politik umat Islam yang telah menjadi pijakan sejak masa

<sup>1</sup> Bahri, Saiful. *Membumikan Pendidikan Akhlak (Konsep, Strategi, dan Aplikasi)*. Sumatra Barat: Miitra Cendekia Media, 2023

<sup>2</sup> Philip K. Hitti, 2002, *History of the Arabs*, London: Macmillan

<sup>3</sup> Ibn Katsir. 2014. *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (Vol. 8). Beirut: Dar al-Fikr.

<sup>4</sup> Fazlur Rahman, 1982, *Islam*, Chicago: University of Chicago Press

Nabi Muhammad SAW dan para khalifah terdahulu.<sup>5</sup>

Studi tentang transformasi politik pasca-khalifahan sangat penting dalam kerangka memahami perkembangan struktur kekuasaan dalam Islam. Dalam konteks keilmuan, fenomena ini menjadi kajian menarik dalam bidang sejarah politik Islam, studi pemerintahan, dan bahkan ilmu politik modern. Muawiyah tidak hanya menjadi tokoh sejarah, tetapi juga simbol perubahan cara pandang umat Islam terhadap legitimasi kekuasaan.<sup>6</sup> Apakah kekuasaan merupakan amanah yang harus dipilih secara kolektif, ataukah bisa diwariskan secara turun-temurun demi stabilitas politik?

Melalui pendekatan library research, penelitian ini akan mengkaji lebih jauh bagaimana Muawiyah Ibn Abi Sufyan memainkan peran penting dalam mentransformasikan sistem pemerintahan Islam. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menjustifikasi atau menilai secara normatif tindakan-tindakannya, tetapi berupaya memetakan perubahan struktur kekuasaan dan bagaimana hal tersebut

memengaruhi arah sejarah politik Islam selanjutnya.<sup>7</sup> Kajian ini juga penting untuk memahami bagaimana dinamika kekuasaan dan otoritas berkembang dalam masyarakat Islam, serta bagaimana warisan politik masa lalu terus memengaruhi pola kepemimpinan hingga masa kini.

Muawiyah menjadi tokoh yang menantang dalam sejarah Islam: ia adalah sahabat Nabi, tokoh administratif ulung, sekaligus penginisiasi sistem dinasti yang kelak menjadi pola baku dalam pemerintahan Islam selama berabad-abad. Peran ganda ini membuatnya berada dalam posisi yang kompleks di satu sisi sebagai penjaga stabilitas umat, dan di sisi lain sebagai tokoh yang menggeser paradigma kepemimpinan Islam.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penting bagi akademisi untuk mengkaji ulang kontribusi dan kontroversi yang melekat pada figur Muawiyah secara objektif dan ilmiah.

Akhirnya, kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika politik Islam klasik, serta memberikan kerangka

<sup>5</sup> Madelung, W. 1997. *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*. Cambridge: Cambridge University Press.

<sup>6</sup> Atho Mudzhar, M. 2003. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

<sup>7</sup> Harun Nasution, 1995, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya: Jilid I*, Jakarta: UI Press

<sup>8</sup> Watt, W. M. 1961. *Islamic Political Thought*. Edinburgh: Edinburgh University Press

analisis bagi studi-studi lanjutan mengenai evolusi sistem pemerintahan Islam. Dengan menelaah peran Muawiyah Ibn Abi Sufyan dalam pembentukan dinasti, kita tidak hanya melihat potret masa lalu, tetapi juga dapat merefleksikan tantangan-tantangan kepemimpinan dalam dunia Islam kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi politik Islam pasca wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib?
2. Apa peran strategis Muawiyah Ibn Abi Sufyan dalam proses transisi kekuasaan dari sistem khilafah ke sistem dinasti?
3. Bagaimana dinamika dan implikasi politik dari pembentukan Dinasti Umayyah terhadap struktur pemerintahan Islam?

Apa saja faktor yang memengaruhi diterimanya sistem dinasti oleh masyarakat Islam pada masa itu?

## B. METODE

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengandalkan kajian literatur<sup>9</sup> untuk menganalisis peran Muawiyah Ibn Abi Sufyan dalam pembentukan sistem dinasti setelah periode Khulafaur Rasyidin. Metode **library research** dipilih karena penelitian ini lebih menekankan pada pengumpulan data dari sumber-sumber sekunder, yakni karya-karya literatur yang dapat memberikan informasi dan analisis terkait peran politik Muawiyah dalam membentuk Dinasti Umayyah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan politik. Pendekatan historis membantu peneliti untuk memahami latar belakang sejarah yang mendasari perubahan besar dalam politik Islam pasca-Khalifahan, sementara pendekatan politik mengarahkan peneliti untuk menganalisis dampak perubahan tersebut terhadap struktur pemerintahan dan pembentukan sistem dinasti.

### Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### 1. **Sumber Primer:**

Sumber primer adalah teks-teks

<sup>9</sup> Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta

sejarah klasik yang mengandung informasi langsung terkait dengan masa kekhalifahan Muawiyah.

## 2. Sumber Sekunder:

Sumber sekunder digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif kontemporer terhadap peristiwa sejarah tersebut. Buku-buku dan artikel jurnal yang relevan dengan topik ini.

### Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode **studi dokumentasi** dan **kritik sumber**.

Langkah-langkah pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. **Studi Dokumentasi:** Peneliti mengumpulkan data melalui bacaan terhadap kitab-kitab sejarah klasik, artikel ilmiah, dan jurnal terkait. Bacaan ini digunakan untuk memahami konteks sejarah dan politik pada masa tersebut.
2. **Kritik Sumber:** Setiap sumber yang ditemukan diuji keabsahannya dengan mempertimbangkan aspek konteks, tujuan penulisan, dan perspektif yang digunakan oleh penulis sumber tersebut. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan tidak hanya sahih dari sisi historis, tetapi juga relevan dengan tema yang dibahas.

### Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik **deskriptif-analitis**, dengan langkah-langkah berikut:

1. **Deskripsi Sejarah:** Peneliti menyajikan fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan pemerintahan Muawiyah, termasuk aspek politik, sosial, dan ideologis pada masa transisi dari Khulafaur Rasyidin ke Dinasti Umayyah. Deskripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang periode tersebut.
2. **Analisis Tematik:** Data dianalisis berdasarkan tema-tema utama yang muncul dalam penelitian ini, seperti **peran Muawiyah dalam perubahan politik, konsep khilafah, dan implikasi pembentukan dinasti**. Analisis tematik bertujuan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan dampak dari peristiwa-peristiwa tersebut.

**Interpretasi Kritis:** Peneliti melakukan interpretasi terhadap hasil analisis untuk mengkaji apakah sistem dinasti yang dibentuk oleh Muawiyah memiliki dampak signifikan terhadap struktur kekuasaan Islam secara keseluruhan. Hal ini juga mencakup penilaian terhadap persepsi masyarakat dan kelompok-kelompok dalam Islam terhadap perubahan ini.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Politik Islam Pasca Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib**

Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 M, dunia Islam berada dalam situasi ketidakstabilan politik yang cukup serius. Perang saudara (fitnah kubra) antara kubu Ali dan Muawiyah telah melemahkan persatuan umat Islam. Kelompok pendukung Ali (Syiah Ali) merasa kehilangan arah setelah wafatnya sang khalifah, sementara pihak Muawiyah yang sebelumnya menolak kepemimpinan Ali semakin menguatkan posisinya, terutama dengan dukungan penuh dari wilayah Syam (Suriah).

Situasi ini menciptakan kekosongan kepemimpinan formal, hingga akhirnya Hasan bin Ali, putra Ali, menerima kesepakatan damai dengan Muawiyah dan menyerahkan kekhalifahan kepadanya dengan syarat bahwa kekuasaan tidak diwariskan. Kesepakatan ini kemudian dikenal sebagai Tahun Jama'ah (*Ām al-Jamā'ah*), karena dianggap menyatukan kembali umat Islam yang sebelumnya terpecah (Ibn Katsir, 2014). Namun demikian, kondisi ini sebenarnya bukan penyatuan yang ideal, melainkan

kompromi politik. Dalam praktiknya, pengaruh Muawiyah semakin meluas, dan ia mulai menyusun struktur kekuasaan yang lebih terpusat dan otoriter dibandingkan masa Khulafaur Rasyidin.

#### **Peran Strategis Muawiyah Ibn Abi Sufyan dalam Transisi Kekuasaan**

Muawiyah memainkan peran strategis dalam mengubah sistem pemerintahan Islam. Sebagai Gubernur Syam yang telah memerintah selama lebih dari dua dekade, ia memiliki basis kekuasaan yang kuat, militer yang loyal, dan jaringan birokrasi yang solid. Setelah berhasil menjadi khalifah, Muawiyah mulai melakukan sentralisasi kekuasaan, termasuk menyingkirkan oposisi politik, memperkuat otoritas keluarga, dan menunjuk para pejabat berdasarkan loyalitas.

Langkah paling signifikan adalah ketika ia secara eksplisit mengangkat putranya, Yazid, sebagai penerus—suatu tindakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sistem khilafah. Dengan demikian, Muawiyah bukan hanya bertindak sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pendiri sistem dinasti turun-temurun

dalam pemerintahan Islam.<sup>10</sup> Keputusan ini menuai banyak penolakan, terutama dari tokoh-tokoh besar seperti Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Namun karena kekuatan politik dan militer yang dimilikinya, Muawiyah mampu mengamankan suksesi tersebut hingga akhir hayatnya.

### **Dinamika dan Implikasi Politik Pembentukan Dinasti Umayyah**

Pembentukan Dinasti Umayyah membawa perubahan mendasar dalam struktur pemerintahan Islam. Kepemimpinan yang sebelumnya bersifat kolektif dan berdasarkan musyawarah umat (syura), berubah menjadi sistem pewarisan kekuasaan. Model ini menggeser nilai-nilai egaliter yang menjadi dasar sistem politik pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin.

Secara praktis, sistem dinasti mempercepat proses pengambilan keputusan dan menjamin kesinambungan pemerintahan, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, dan marginalisasi kelompok oposisi.

Seiring waktu, Dinasti Umayyah lebih menonjolkan simbol-simbol kekaisaran dan kemewahan yang berbeda jauh dari kesederhanaan para khalifah terdahulu.<sup>11</sup>

Meski begitu, Dinasti Umayyah juga mencatat keberhasilan dalam memperluas wilayah Islam, membangun infrastruktur administrasi, dan menyebarkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan. Dengan demikian, meskipun menuai kritik, dinasti ini tetap memainkan peran penting dalam ekspansi dan konsolidasi kekuasaan Islam.

### **Faktor yang Memengaruhi Diterimanya Sistem Dinasti oleh Masyarakat Islam**

Beberapa faktor turut memengaruhi diterimanya sistem dinasti pada masa Muawiyah, antara lain:

1. Kelelahan politik umat Islam setelah perang saudara yang berkepanjangan, sehingga stabilitas menjadi prioritas utama.
2. Kekuatan militer dan pengaruh politik Muawiyah, terutama di wilayah Syam, yang membuat penolakan terhadap sistem baru menjadi sulit dan berisiko tinggi.

<sup>10</sup> Madelung, W. 1997. *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*. Cambridge: Cambridge University Press.

<sup>11</sup> Rahman, F. 1982. *Islam*. Chicago: University of Chicago Press.

3. Strategi diplomasi dan kontrol informasi, di mana Muawiyah mengelola opini publik melalui para khatib di mimbar Jumat untuk membangun legitimasi politik.
4. Minimnya sistem kelembagaan yang mapan dalam mengatur suksesi kekuasaan, sehingga umat cenderung mengikuti kekuatan dominan yang ada.

Selain itu, keberhasilan Muawiyah dalam mengelola stabilitas dan menghindari konflik besar di awal masa kekuasaannya membuat sebagian besar masyarakat menerima sistem dinasti sebagai solusi praktis, meskipun menyimpang dari nilai-nilai awal Islam.

## PEMBAHASAN

### Transisi dari Khilafah Syura ke Sistem Dinasti

Perubahan politik pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib adalah perubahan mendasar dalam sejarah Islam. Jika sistem pemerintahan sebelumnya didasarkan pada prinsip **syura**, di mana pemimpin dipilih melalui musyawarah para sahabat dan pemuka umat, maka setelah naiknya Muawiyah ke tampuk kekuasaan, prinsip tersebut secara perlahan bergeser menuju sistem **hereditas (turun-temurun)**. Muawiyah menandai perubahan itu dengan cara mewariskan kekuasaan kepada

putranya, Yazid, yang menjadi preseden baru dalam sistem politik Islam. Meskipun keputusan ini ditentang oleh beberapa tokoh besar seperti Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair, kekuatan politik, militer, dan diplomasi Muawiyah berhasil memuluskan jalan bagi berdirinya Dinasti Umayyah.

### Kekuatan dan Strategi Politik Muawiyah

Muawiyah memanfaatkan posisinya sebagai gubernur Syam secara optimal. Ia membangun loyalitas kuat dari rakyat dan tentaranya, dan menciptakan sistem administrasi pemerintahan yang lebih rapi. Pengalamannya sebagai administrator menjadikannya sosok yang efisien dan berpengaruh. Ia juga dikenal lihai dalam membina relasi politik dan memainkan strategi kompromi—termasuk ketika melakukan perdamaian dengan Hasan bin Ali untuk menghindari perpecahan lebih lanjut. Namun, keputusan Muawiyah untuk menunjuk Yazid sebagai pengganti menimbulkan kontroversi besar. Dari sudut pandang politik, langkah tersebut menunjukkan keinginan untuk **menciptakan stabilitas kekuasaan**, tetapi dari sisi nilai Islam awal, itu adalah penyimpangan terhadap prinsip pemilihan pemimpin

berdasarkan kompetensi dan konsensus umat.

### **Implikasi terhadap Struktur Pemerintahan Islam**

Sistem dinasti membawa perubahan besar dalam pemerintahan Islam, baik secara struktural maupun ideologis. Khilafah bergeser dari konsep **kepemimpinan religius yang partisipatif** menjadi **kekuasaan yang lebih otoriter dan terpusat** pada satu keluarga. Dinasti Umayyah memang berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam secara signifikan dan membangun infrastruktur pemerintahan yang kuat. Namun, sistem ini juga membuka celah bagi perebutan kekuasaan, pertumpahan darah, dan polarisasi politik yang dalam antara pendukung legitimasi dinasti dan kelompok oposisinya, seperti Syiah dan kelompok khawarij.

### **Penerimaan Masyarakat terhadap Sistem Dinasti**

Masyarakat Islam saat itu menerima sistem dinasti lebih karena faktor **kebutuhan akan stabilitas** dan karena **tidak adanya sistem formal** suksesi kekuasaan yang mapan. Selain itu, kekuatan propaganda politik serta tekanan militer juga menjadi alasan banyak pihak memilih untuk bersikap pasif atau kompromi terhadap perubahan

tersebut. Fakta bahwa masyarakat tetap memberi legitimasi terhadap pemerintahan Muawiyah dan penerusnya menunjukkan adanya **proses internalisasi nilai kekuasaan baru**, meskipun hal ini kemudian memunculkan berbagai gerakan perlawanan yang akan terus mewarnai sejarah Islam hingga masa-masa selanjutnya

### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. **Kondisi politik pasca Khulafaur Rasyidin** sangat tidak stabil akibat perang saudara dan konflik kepentingan antara kubu Ali dan Muawiyah. Kekosongan kekuasaan dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk mengambil alih kepemimpinan secara politis.
2. **Muawiyah Ibn Abi Sufyan** memainkan peran strategis dalam membentuk sistem dinasti pertama dalam sejarah Islam melalui pendekatan diplomasi, kekuatan militer, dan administrasi yang mapan. Ia mengubah paradigma kekuasaan dari syura menjadi hereditas.
3. **Pembentukan Dinasti Umayyah** mengubah **struktur pemerintahan Islam** dari kolektif

dan egaliter menjadi otoriter dan terpusat. Meski dinasti ini sukses dalam ekspansi wilayah dan pembangunan institusi, perubahan ini juga meninggalkan jejak konflik dan ketegangan ideologis yang panjang dalam sejarah Islam.

**Faktor utama penerimaan sistem dinasti oleh masyarakat** adalah kelelahan politik, ketidaksiapan struktur kelembagaan suksesi, serta dominasi kekuatan politik Muawiyah yang nyaris tak tertandingi. Hal ini menyebabkan transisi ke sistem dinasti berlangsung tanpa perlawanan masif pada awalnya

## REFERENSI

- [1] Bahri, Saiful. *Membumikan Pendidikan Akhlak (Konsep, Strategi, dan Aplikasi)*. Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2023.
- [2] Atho Mudzhar, M. 2003. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- [3] Fazlur Rahman, 1982, *Islam*, Chicago: University of Chicago Press
- [4] Harun Nasution, 1995, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya: Jilid I*, Jakarta: UI Press
- [5] Hitti, P. K. 2002. *History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present*. London: Macmillan.
- [6] Ibn Katsir. 2014. *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (Vol. 8). Beirut: Dar al-Fikr.
- [7] Madelung, W. 1997. *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [8] Nasution, H. 1995. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya: Jilid I*. Jakarta: UI Press.
- [9] Philip K. Hitti, 2002, *History of the Arabs*, London: Macmillan
- [10] Rahman, F. 1982. *Islam*. Chicago: University of Chicago Press.
- [11] Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta
- [12] W. Montgomery Watt, 1961, *Islamic Political Thought*, Edinburgh: Edinburgh University Press
- [13] Watt, W. M. 1961. *Islamic Political Thought*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- [14] Wilferd Madelung, 1997, *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*, Cambridge: Cambridge University Press
- [15] Zubaidi, A. 2007. *Sejarah Kekhalifahan Islam: dari Masa Khulafaur Rasyidin hingga Abbasiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar